



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH**



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR **25** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);  
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV  
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN  
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu  
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I           PENDAHULUAN  
Memuat :
    - 1. Latar Belakang;
    - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
    - 3. Maksud dan Tujuan;
    - 4. Sistematika Penulisan.
  - b. Bab II           GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
    - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
      - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
      - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
      - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
      - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelolmpok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
    - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
      - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
      - b) Isu strategis.
  - c. Bab III       TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat :
    - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
    - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
    - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
    - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
  2. Uraian Kegiatan;
  3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
  4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
  5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
  6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan  
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
  
ANWAR HAFID



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812  
**P A L U**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 900.1.7.1/**249.12**/BPKAD/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 maka dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang Transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.
  - b. bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis perangkat daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2049;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2025, tentang Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025 - 2029;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI SULAWESI TENGAH 2025-2029
- Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ketiga : Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
- Keempat : Sistematika Penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi BPKAD, Sumber daya BPKAD, Kinerja Pelayanan BPKAD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH BEKIJAKAN  
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD.

d. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN  
Memuat Rencana Program, Kegiatan dan  
Pencapaian tujuan BPKAD.

e. BAB V : PENUTUP  
Memuat Kaidah Pelaksanaa, Kaidah Pembiayaan  
dan Rencana Tindak Lanjut.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila  
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PALU

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

Plt.KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DR. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Pembina Utama Madya

Nip : 19701209 199103 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat *Allah SubhanahuWaTa'ala* atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 ini merupakan implementasi dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 agar kebijakan yang dilakukan tepat sasaran sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, semoga dapat dokumen ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Palu, 25 September 2025

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 197012091991031001

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan BPKAD	24
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan BPKAD	57
2.4.1 Mitra BPKAD dalam pemberian Pelayanan	58
2.4.2 Kerjasama dengan BUMD dalam pencapaian Kinerja BPKAD	58
2.5 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis BPKAD	60
2.6 Telaahan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	62
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>65</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65
3.1.1. Tujuan	65
3.1.2. Sasaran	65
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	72
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATA, SUB KEGIATAN DAN KIENRJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>81</b>
4.1 Uraian Program, Kegiatan	82
4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	108
4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	140
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD	143
4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	144
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>146</b>
8.1. Kaidah Pelaksanaan	146
8.2. Kaidah Pembiayaan	146
8.3. Rencana Tindak Lanjut	147

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan BPKAD	23
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	24
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	24
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26
Tabel 2.5	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	47
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKAD	60
Tabel 2.9	Telaah Visi Dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur	64
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD	71
Tabel 3.2	Penentuan Alternatif Strategi	74
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan	77
Tabel 3.4	Penahapan Renstra BPKAD	79
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BPKAD	80
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	82
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah	108
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	140
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	143
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra	145

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

**DAFTAR BAGAN**

Bagan Struktur Organisasi BPKAD	22
Bagan Cascading Renstra BPKAD	66

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan Pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yang akan dijadikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah selama masa periode Renstra.

Penyusunan Renstra BPKAD berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Perumusan Kebijakan Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah.

Fungsi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Renstra ini berfungsi sebagai landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan.

Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada

pelaksanaanya nanti diharapkan akan memberi kontribusi besar dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

## 1.2 Landasan Hukum.

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, maka Renstra BPKAD dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehingga memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tujuan penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi Gubernur menjadi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dari sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD, dalam bentuk

perumusan program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator dan target kinerja BPKAD selama 5 (Lima) Tahun.

- b. Menjadi pedoman bagi BPKAD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD setiap tahunnya.
- d. Sebagai pedoman dalam pengukuran kinerja BPKAD setiap tahunnya.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis BPKAD ini berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai Berikut :

➤ **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang, menjelaskan secara ringkas pengertian renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra, menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPKAD
- 1.3 Maksud dan Tujuan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra BPKAD
- 1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPKAD serta susunan garis besar isi dokumen

➤ **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**2.1. Gambaran Pelayanan BPKAD**

- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi serta uraian tugas.
- 2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki BPKAD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menjelaskan tentang tingkat capaian BPKAD berdasarkan sasaran/ target Renstra BPKAD periode sebelumnya.
- 2.1.4 Kelompok sasaran layanan BPKAD, Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD**

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis BPKAD

## ➤ **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)**

3.1. Tujuan Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029.

3.3. Strategi BPKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025 – 2029.

3.4. Arah Kebijakan BPKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025-2029.

## ➤ **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029 melalui IKU PD

4.6 Target kinerja penyelenggaraam urusan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## ➤ **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

##### 1. Kepala Badan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan dibidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Pengelolaan Aset.
  - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah.
  - d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

##### 2. Sekretaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 1 (Satu) Sub Bagian yaitu :

**(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
2. Uraian tugas Sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
  - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
  - e. melaksanakan/ menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP;
  - f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum;
  - g. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
  - h. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

- i. melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

### 3. Bidang Anggaran

1. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
  - f. penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

**(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran**

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Penyusunan Anggaran. yang meliputi antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- c. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Penyusunan Anggaran dengan unit kerja/instansi terkait;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan rencana Penyusunan Anggaran;
- e. Melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis terkait penyusunan anggaran terhadap seluruh Perangkat Daerah serta terhadap Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta pengantar nota keuangan;
- g. melaksanakan pembinaan Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pada Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data,  
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sub Bidang Penyusunan Anggaran

**(2) Sub Bidang Manajemen Anggaran**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Manajemen Anggaran.

Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, dan petunjuk teknis

- pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Penyusunan Anggaran dengan unit kerja/instansi terkait;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan rencana Penyusunan Anggaran;
  - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis terkait penyusunan anggaran terhadap seluruh Perangkat Daerah serta terhadap Kabupaten/Kota;
  - f. melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta pengantar nota keuangan;
  - g. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pada Sub Bidang Penyusun Anggaran;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

### **(3) Sub Bidang Manajemen Anggaran**

1. Sub Bidang Manajemen Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Manajemen Anggaran.
2. Uraian tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Manajemen Anggaran;
  - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Manajemen Anggaran;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Manajemen Anggaran terhadap Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD bersama-sama dengan DPRD Provinsi;
  - d. Melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data dalam rangka mempersiapkan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta menyiapkan data terkait dengan penyusunan DPA Lanjutan;
  - f. Menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah serta investasi pemerintah daerah;

- g. Melaksanakan penelitian RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah;
- h. Melakukan analisa serta Menyusun Bahan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- i. Melaksanakan menyiapkan data lainnya guna keperluan Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- j. Melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran.

#### **4. Bidang Akuntansi**

1. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen dan Evaluasi Pertanggungjawaban.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - c. Pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - f. Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

##### **(1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang

Akuntansi dan Pelaporan.

2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
  - b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan Akuntansi Pelaporan;
  - d. Menyusun rancangan perubahan kebijakan akuntansi pemerintah Daerah, Rancangan perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah serta rancangan kebijakan lain yang berkaitan dengan penguatan fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah serta melaksanakan sosialisasi;
  - e. Melaksanakan fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah baik Pendapatan, Belanja, Hutang, Piutang, Investasi dan lainnya atas Pelaksanaan APBD setiap bulan;
  - f. Melaksanakan rekonsiliasi dan atas semua bahan/ data yang terkait dengan akun Laporan Keuangan dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebelum Penyusunan Laporan;
  - g. Melaksanakan penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, Semesteran dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap akhir tahun;
  - h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada lembaga Daerah yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan Sistem Prosedur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - i. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan hasil koreksi audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - j. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan akuntansi dan pelaporan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

**(2) Sub Bidang Akuntansi Manajemen**

1. Sub Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi Manajemen.
2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bidang Akuntansi Manajemen;
  - b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Manajemen;
  - c. Melaksanakan peyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan Pelaksanaan Akuntansi Manajemen serta Pelaksanaan APBD Provinsi bersama dengan DPRD;
  - d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - e. Melaksanakan penyiapan data pembukuan Bendahara baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran termasuk Badan Layanan Umum Daerah secara berkala sebagai bahan Penyusunan Laporan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan meminta Laporan Keuangan setiap akhir tahun sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - g. Melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Kepegawaian, pembayaran gaji serta berkoordinasi dengan BKD, Perangkat Daerah dan Bidang Perbendaharaan;
  - h. Melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Aset tetap dan persediaan secara berkala dan berkoordinasi dengan Bidang Aset

- sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. Menyiapkan data capaian kinerja dan indikator Pembangunan, pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah serta lembaga lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - j. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pembinaan tentang Akuntansi Manajemen atas Pelaksanaan APBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Akuntansi Manajemen.

#### **5. Bidang Perbendaharaan**

1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - c. Pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - d. Pelaksanaan pengkoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - e. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - h. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

**(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung**

1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung.
2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
  - b. Menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
  - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan teknis Belanja Tidak Langsung dengan pihak dan unit kerja/ Instansi terkait;
  - d. Melaksanakan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas Belanja Tidak Langsung;
  - e. Melakukan administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - f. Melakukan administrasi penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
  - g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran belanja berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
  - h. Melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

**(2) Sub Bidang BelanjaLangsung**

1. Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Belanja Langsung.

2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Belanja langsung;
  - b. Menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung;
  - c. Melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
  - e. Melakukan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas belanja langsung;
  - f. Melakukan administrasi penerbitan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D);
  - g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
  - h. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Belanja Langsung;

## **6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

1. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pengawasan Aset Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan

dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, serta Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

**(1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah**

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.
2. Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - b. Menghimpun Peraturan Perundangan-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Perencanaan Dan

- Penatusahaan Aset Daerah dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait antara lain penyusunan kebutuhan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah, penetapan status Barang Milik Daerah;
- d. Melaksanakan mengumpulkan bahan pemantauan, dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;
  - e. Melaksanakan Proses administrasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;
  - f. Melaksanakan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi, dan menyusun Laporan mutasi barang, Laporan persediaan barang, Laporan hasil pengadaan barang dan Laporan hasil pemeliharaan barang;
  - g. Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan Laporan mutasi barang;
  - h. Melakukan bimbingan teknis pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - i. Melaksanakan pembinaan kabupaten/kota;
  - j. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.

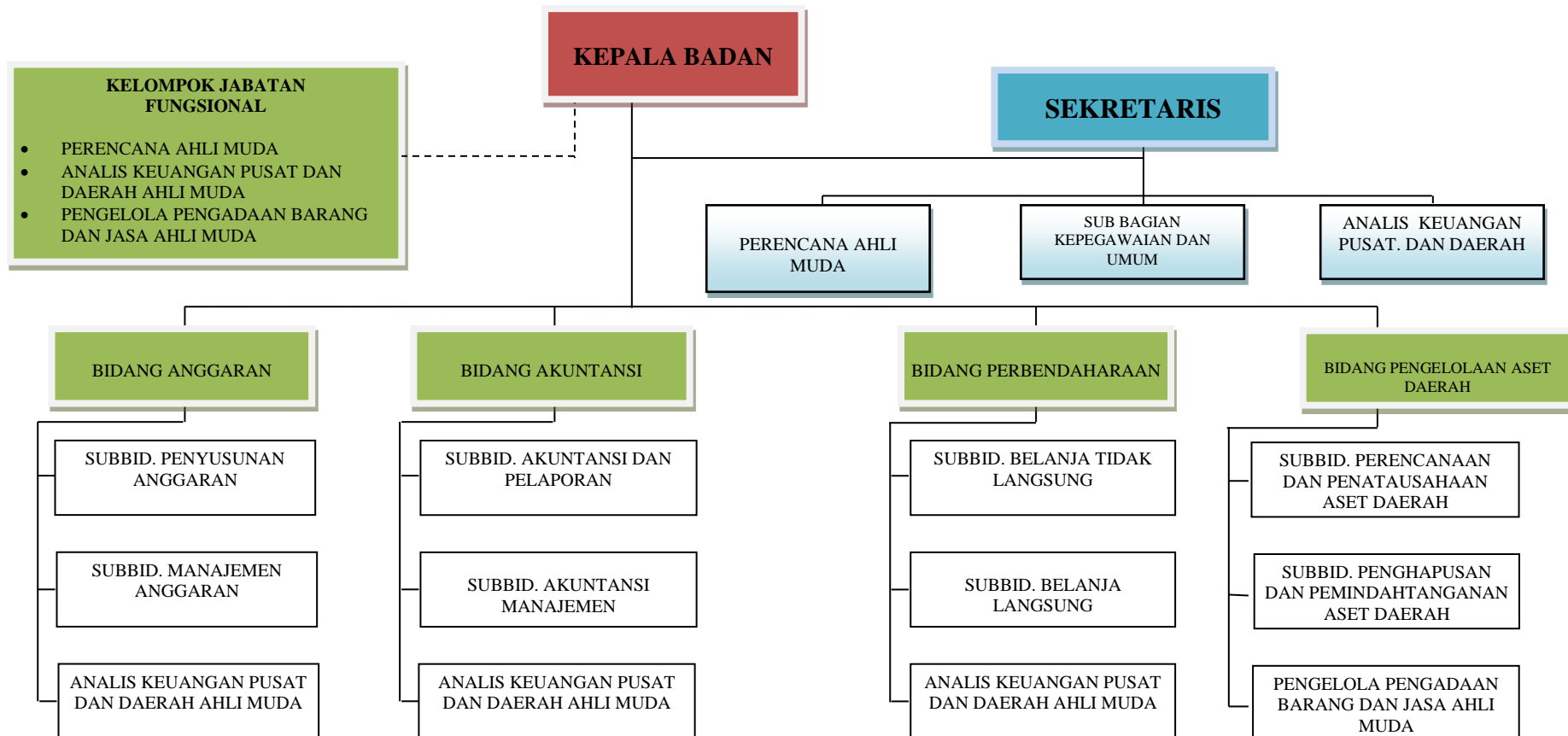
**(2) Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah**

1. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
2. Uraian tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
  - b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Penghapusan dan pemindahtanganan asset daerah;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan

- penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;
- d. Menghimpun bahan dan data, menganalisa serta menyelenggarakan kegiatan koordinasi penghapusan/ perubahan status hukum Aset Daerah;
  - e. Memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;
  - f. Melakukan Pembinaan Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
  - g. Melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



## 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kapasitas pelayanan terhadap masyarakat umum dibidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan Aset daerah serta didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah sebanyak 326 Orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 191 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 135 Orang, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan**  
**Tingkat Pendidikan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2025**

No	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IV/b	-	5	-	-	-	-	-	5
5	IV/a	-	18	-	-	-	-	-	18
<b>Sub Total</b>		-	<b>22</b>	-	-	-	-	-	<b>23</b>
6	III/d	-	18	17	-	-	-	-	35
7	III/c	-	12	17	-	-	-	-	29
8	III/b	-	5	10	-	3	-	-	18
9	III/a	-	-	10	-	4	-	-	14
<b>Sub Total</b>		-	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	-	-	<b>96</b>
10	II/d	-	-	-	-	3	-	-	3
11	II/c	-	-	-	-	7	-	-	7
12	II/b	-	-	-	-	2	-	-	2
13	II/a	-	-	-	-	1	-	-	1
14	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		-	-	-	-	<b>13</b>	-	-	<b>13</b>
15	IX	-	-	56	-	-	-	-	56
16	V	-	-	-	-	3	-	-	3
<b>Sub Total</b>		-	-	<b>56</b>	-	<b>3</b>	-	-	<b>59</b>
<b>JUMLAH</b>		-	<b>34</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>35</b>			<b>191</b>

Sumber: Subbag Kepegawaian BPKAD

Catatan :

- Pegawai laki-Laki = 95 Orang

- Pegawai Perempuan = 96 Orang

Total = 191 Orang

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon**

No	Pegawai	Jumlah
1	Esselon II	-
2	Eselon III	5 Orang
3	Eselon IV	9 Orang
4	Fungsinoal	3 Oreang
5	Staf ASN	174 Orang
6	Honoror	135 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>326 Orang</b>

Sumber: Subbag Kepegawaian BPKAD

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Pegawai	Jumlah
1	Kepala Badan	-
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala Sub Sub Bidang	8 Orang
5	Kepala Sub Bagian	1 Orang
6	Jabatan Fungsional	3 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>17 Orang</b>

Sumber: Subbag Kepegawaian BPKAD

### 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di mulai dari proses Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Keuangan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pedoman penyusunan anggaran, pedoman

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah, sedangkan di bidang pengelolaan aset daerah berupa pedoman penyusunan Rancangan Kebutuhan Barang Badan Pemerintah Milik Daerah dan pedoman Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset serta pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada periode masa Renstra 2021-2026 sebelumnya, BPKAD memiliki indikator kinerja sebagai dasar untuk menentukan Perencanaan Strategis dalam masa 5 Tahun, Adapun Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
2. Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

**Tabel 2.4**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2020 – 2024**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET Renstra dari Tahun ke Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				-	Baik	Baik	Baik	Baik	-	C (Sangat Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	-	C	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, dapat digambarkan bahwa Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulteng sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja BPKAD menjalankan Fungsinya sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan Program Kegiatan sejak Tahun 2020 sampai sekarang dengan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berawal dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran penyajian sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).
2. Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Belum tercapai khususnya ditahun 2022 mendapat Nilai C dan Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dengan mendapatkan Nilai B, dengan angka 69,071 (Perlu Perbaikan). Hal ini terjadi karena pada tahun 2023 telah melakukan perbaikan-perbaikan penginputan pada Dimesi 1, Dimensi 2, Dimensi 3, Dimensi 4, Dimensi 5 dan Dimensi 6.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

Tabel 2.5  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan BPKAD	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan strategis yang Relevan dengan BPKAD			Isu Strategi BPKAD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Masih ada temuan BPK terkait kesalahan administrasi	Penguatan tata kelola keuangan daerah (konsistensi, akuntabilitas, transparansi dan integritas)	Tekanan ekonomi global, ketidakpastian fiskal, dampak perubahan iklim terhadap keuangan daerah	Menekankan percepatan reformasi birokrasi, penguatan transparansi, dan peningkatan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini selaras dengan upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah, menindaklanjuti temuan audit BPK dengan cepat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan modernisasi sistem keuangan pemerintah daerah.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel. Ini menuntut aparat daerah untuk optimal dalam menindaklanjuti temuan audit, meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan mengadopsi sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.	Penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan BPKAD	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan strategis yang Relevan dengan BPKAD			Isu Strategi BPKAD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan BMD berupa tanah, bangunan dan barang inventaris lainnya	Lahan milik Pemda belum bersertifikat, kasus penyalahgunaan BMD masih ditemukan	Optimalisasi sertifikasi BMD, pengamanan BMD dan pengelolaan BMD berkelanjutan	Globalisasi menuntut standar pengelolaan BMD yang transparan, akuntabel, dan berbasis data yang akurat serta teknologi terkini. Pengelolaan BMD harus mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan adaptasi terhadap tantangan global	Optimalisasi sertifikasi BMD dan penegakan pengamanan yang efektif menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dengan prinsip good governance.	Pensertifikatan lahan milik daerah dan pengelolaan BMD yang berkelanjutan menjadi prioritas strategis untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal.	Pensertifikatan lahan milik daerah dan penguatan pengamanan serta pengelolaan BMD yang efektif
Pengelolaan SDM dan Kapasitas Aparatur	SDM BPKAD yang masih perlu ditingkatkan	Kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan dan BMD	Revolusi industri 5.0 menuntut SDM yang adaptif dan kompeten	Program penguatan kapasitas melalui pelatihan, sharing session, dan pemanfaatan teknologi menjadi agenda utama untuk membentuk SDM yang dapat mendukung tata kelola keuangan	"Berani Membangun Sulawesi Tengah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing" mengharuskan penguatan sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas guna mendorong efisiensi pelayanan dan pengelolaan keuangan	Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM BPKAD melalui pelatihan dan pengembangan profesi

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan BPKAD	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan strategis yang Relevan dengan BPKAD			Isu Strategi BPKAD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan BMD yang lebih baik.	daerah yang transparan dan akuntabel.	
Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana prasarana kantor untuk ruang kantor masih terbatas	Modernisasi dan adaptasi sarana/prasarana untuk mendukung kerja efektif	Transformasi digital dan revolusi industri 5.0 membawa tuntutan global terhadap standardisasi fasilitas kerja yang modern, terkoneksi dengan teknologi informasi mutakhir, serta mendukung kolaborasi efektif dalam organisasi pemerintahan demi meningkatkan pelayanan publik berkualitas dan transparan.	Program reformasi birokrasi pada tingkat nasional mengedepankan modernisasi fasilitas pemerintahan daerah sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas. Pemerintah menekankan penyediaan sarana yang memadai untuk mendukung kerja aparatur yang produktif dan berbasis teknologi digital.	Modernisasi sarana dan prasarana kantor serta penataan ruang kerja yang ideal merupakan bagian dari strategi memperkuat kapasitas institusi daerah dalam mengelola keuangan dan aset secara transparan dan profesional.	Pengembangan sarana dan prasarana kerja yang representatif dan mendukung digitalisasi pelayanan BPKAD
Tindak Lanjut Temuan Audit	Memfasilitasi sebagai	Penguatan koordinasi dan	Tekanan internasional	Program ini sejalan dengan strategi	Penyelesaian temuan audit secara cepat dan	Optimalisasi tindak lanjut

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan BPKAD	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan strategis yang Relevan dengan BPKAD			Isu Strategi BPKAD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sekretariat MPPKAD dalam Percepatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan dari BPK RI dan APIP untuk penyelesaian kerugian daerah	mekanisme penyelesaian temuan audit internal dan eksternal	terhadap good governance dan peningkatan transparansi di sektor publik menuntut pemerintahan daerah untuk menerapkan mekanisme audit yang efektif dan tindak lanjut yang responsif guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Standar global mendorong penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses pengelolaan risiko dan penyelesaian audit.	memperkuat aparat pengawasan, meningkatkan efisiensi koordinasi antar lembaga, serta membangun budaya kerja yang responsif dalam menyelesaikan rekomendasi BPK dan APIP.	menyeluruh menjadi salah satu prioritas kunci untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.	temuan audit dan pengelolaan risiko kerugian keuangan daerah
Penggunaan	Pengembangan	Integrasi sistem	Perkembangan	mendorong	optimalisasi	Penerapan

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan BPKAD	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan strategis yang Relevan dengan BPKAD			Isu Strategi BPKAD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aplikasi Keuangan Daerah (Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban)	dan Pemeliharaan penggunaan Aplikasi Keuangan Daerah (Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban)	informasi manajemen keuangan dan BMD	teknologi digital dan standarisasi sistem keuangan publik global menuntut pemerintah daerah mengadopsi aplikasi berbasis teknologi canggih yang mampu mengelola data secara real-time, meminimalisir risiko kesalahan, dan mempercepat proses pelaporan serta pengambilan keputusan berbasis data.	digitalisasi sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional. Penggunaan aplikasi terintegrasi menjadi landasan utama dalam mewujudkan good governance dan pelayanan publik berkualitas.	pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan sistem informasi yang terintegrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan . Implementasi aplikasi ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan memungkinkan monitoring kinerja yang lebih efektif.	aplikasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah
Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Koordinasi pengelolaan BMD dengan kabupaten/kota	Penguatan sinergi dan koordinasi antar pemerintahan	Standar global menekankan pentingnya integrasi data dan	Penguatan koordinasi antar lembaga serta pengembangan	Menempatkan pengelolaan BMD sebagai prioritas utama, termasuk membangun	Penguatan mekanisme koordinasi pengelolaan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan BPKAD	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan strategis yang Relevan dengan BPKAD			Isu Strategi BPKAD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	belum optimal	daerah	koordinasi antar unit pemerintahan untuk menjamin kualitas pengelolaan BMD.	mekanisme sinkronisasi data dan kebijakan di tingkat daerah. Hal ini bertujuan mengatasi fragmentasi pengelolaan BMD dan memastikan akuntabilitas pengelolaan BMD di seluruh tingkatan pemerintahan.	sinergi dan koordinasi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota. Upaya ini mengakselerasi peningkatan kualitas tata kelola BMD yang dapat meningkatkan pendapatan daerah serta menekan potensi risiko kerugian.	BMD antar perangkat daerah

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

**Tabel. 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD	3	3	3	3	5	3	3	3	3	5	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen RKA-BPKAD	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-BPKAD	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen DPA-BPKAD	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-BPKAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja BPKAD	14	14	14	14	21	14	14	14	14	21	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP Dalam Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>65</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Jumlah Laporan Register SP2D Lingkup BPKAD Yang Disusun	138	138	138	12	12	138	138	138	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) yang disusun	4	4	4	1	2	4	4	4	1	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Buku Kas Umum Lingkup BPKAD yang disusun	4	4	4	1	1	4	4	4	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Register SPP dan SPM Lingkup BPKAD yang disusun	13	13	13	1	1	13	13	13	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup BPKAD	2	2	2	137	138	2	2	2	137	138	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Lingkup BPKAD yang disusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang disusun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK DAN APIP Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah BPKAD yang disusun	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diamankan Lingkup BPKAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>1</b>	<b>93.02</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>1</b>	<b>93.02</b>	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Jenis Pakaian Pegawai dan Atribut yang disediakan	350	350	350	134	3	350	350	350	134	3	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen KP4, Dokumen Anjab dan ABK, Dokumen Evjab Lingkup BPKAD	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BPKAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pegawai di Lingkup BPKAD yang Terlatih	5	5	5	6	5	5	5	5	6	5	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Sosialisasi tentang Keuangan dan Aset	200	200	200	200	2	200	200	200	200	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset	200	200	200	200	2	200	200	200	200	2	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Jumlah Dokumen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan BPKAD yang disediakan	10	10	10	1	1	10	10	10	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokumen Peralatan dan Perlengkapan di Lingkup BPKAD	5	5	5	5	2	5	5	5	5	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Rujab BPKAD yang tersedia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Cetak dan Penggandaan	130540	130540	130540	130540	2	130540	130540	130540	130540	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Instansi yang Tersinkronisasi Kebijakan Program dan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1	1	1	1	14	1	1	1	1	14	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>76.61</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Jumlah Dokumen Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkup BPKAD	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel di Lingkup BPKAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Peralatan Elektronik di Lingkup BPKAD	11	11	11	11	1	11	11	11	11	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Kontrak	1	1	1	1	6	1	1	1	1	6	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah</b>											100%	100%	100%	100%	100%
<b>Indeks SPBE Perangkat Daerah</b>	76.61	76.61	76.61	1	65	76.61	76.61	76.61	1	65	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah</b>											100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Pengelolaan Surat dan Arsip di Lingkup BPKAD					4					4	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Jasa Komunikasi di Lingkup BPKAD yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kelistrikan di Lingkup BPKAD Disediakan					1					1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Jasa Kebersihan dan Perlengkapan Kebersihan BPKAD	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Persentase Pemeliharaan BMD (Jumlah BMD yg terpelihara/Total Jumlah BMD x 100%)</b>	76.61	76.61	76.61	1	100	76.61	76.61	76.61	1	100	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional di Lingkup BPKAD	13	13	13	13	4	13	13	13	13	4	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Gedung Kantor BPKAD	3	3	3	13	1	3	3	3	13	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan Elektronik Di Lingkup BPKAD	3	3	3	13	1	3	3	3	13	1	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun					2					2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen ASB dan HSPK	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Disusun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	48	48	48	40	80	48	48	48	40	80	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39	39	39	40	80	39	39	39	40	80	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Orang yang Terbina	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Persentase Kabupaten/Kota yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Jumlah Surat Keputusan Gubernur Tentang APBD Kabupaten/Kota yang Tersusun	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Surat Keputusan Gubernur Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang Tersusun	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	53	53	53	12	24	53	53	53	12	24	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Penyediaan Dana APBD	234	234	234	6	4	234	234	234	6	4	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen SP2D yang disusun					4					4	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai	4	4	4	24	1	4	4	4	24	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan, Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang disusun	43	43	43	6	20	43	43	43	6	20	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA	13	13	13	19	14	13	13	13	19	14	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS					2					2					
Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah	9	9	9	9	10	9	9	9	9	10	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dengan Bidang Akuntansi					4					4					
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	4	4	4	12	17	4	4	4	12	17	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang disusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Yang Disusun</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Dokumen Akuntansi Manajemen Yang Disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban Yang Disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi atas Laporan Keuangan SKPD dan BLUD yang disusun	80	80	80	80	1	80	80	80	80	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan, Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Belanja, Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota, dan Laporan Konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	238	238	238	225	225	238	238	238	225	225	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokumen Sistem Operasional Prosedur (SOP) Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10000%	10000%	#####	10000%	#####
Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	3	3	3	10	3	3	3	3	10	3					
Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang Disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Standar Harga yang Disusun	6	6	6	2	2	6	6	6	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	4	4	4	8	2	4	4	4	8	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Buku Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Penilaian Kendaraan Dinas, Alat Kantor dan Rumah Tangga yang disusun	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima BPKB dan Sertifikat	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Peminatanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-									
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	39	39	39	40	2	39	39	39	40	2	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah Dokumen Hasil Penilaian BMD Dalam Rangka Penyusunan Neraca					1					1						100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMD					1					1						100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

**Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	-	-	213.971.532.702.00	427.426.996.955.00	301.087.469.153.63	-	-	-		135.561.721.579.00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	211.221.850.127.00	278.369.302.254.00	297.842.936.603.63	-	-	-	106.200.394.026.00	132.544.195.885.00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	1.504.344.000.00	1.949.482.000.00	1.930.683.000.00	-	-	-	1.884.790.000.00	1.904.733.760.00	1	1	1	1	1		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	391.611.100.00	376.648.100.00	352.320.000.00	-	-	-	349.564.416.00	330.559.400.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	70.777.975.00	301.690.000.00	39.100.000.00	-	-	-	281.140.000.00	29.524.800.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	163.276.575.00	161.401.100.00	119.300.000.00	-	-	-	90.144.000.00	111.344.500.00	1	1	1	1	1		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	508.808.050.00	520.163.050.00	661.621.050.00	-	-	-	447.927.400.00	551.675.934.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	62.437.375.00	127.465.600.00	93.908.500.00	-	-	-	107.968.050.00	64.022.300.00	1	1	1	1	1		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	48.427.500.00	90.700.000.00	47.600.000.00	-	-	-	82.486.450.00	25.665.000.00	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>4.271.008.170.00</b>	<b>2.203.067.100.00</b>	<b>1.107.503.800.00</b>	<b>712.167.270.00</b>	<b>1.461.220.850.00</b>	<b>2.862.234.480.00</b>	<b>2.125.570.600.00</b>	<b>2.529.174.272.00</b>		<b>1.235.909.579.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	648.495.000,00	590.990.600,00	1.107.503.800,00	929.249.959,00	1.461.220.850,00	736.565.450,00	546.218.100,00	606.216.730,00	861.204.595,00	1.235.909.579,00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.204.356.992,00	530.814.000,00	-	-	-	682.127.830,00	516.647.000,00	853.428.542,00	-	-	1	1	1	1	1		
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	2.418.156.178,00	1.081.262.500,00	-	-	-	1.443.541.200,00	1.062.705.500,00	-	-	-	1	1	1	1	1		
<b>PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	-	-	<b>2.435.619.958,00</b>	<b>2.192.734.502,00</b>	<b>3.595.609.073,00</b>	-	-	<b>2.435.619.958,00</b>	<b>2.881.717.452,00</b>	<b>3.177.257.295,00</b>	1	1	1	1	1		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	-	-	1.293.891.774,00	2.045.616.177,00	2.228.734.874,00	-	-	1.293.891.774,00	1.927.807.120,00	1.937.423.822,00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	-	1.141.728.184,00	1.012.898.907,00	1.366.874.199,00	-	-	1.141.728.184,00	953.910.332,00	1.239.833.473,00	1	1	1	1	1		
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	-	-	<b>950.449.736,00</b>	<b>644.827.905,00</b>		-	-				1	1	1	1	1		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	122.776.566,00	77.702.064,00	219.273.940,00	-	-	122.776.566,00	76.890.395,00	216.295.000,00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	253.462.400,00	273.347.700,00	421.508.400,00	-	-	253.462.400,00	224.664.100,00	280.397.450,00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	197.256.220,00	134.033.691,00	142.410.460,00	-	-	197.256.220,00	128.577.600,00	140.103.000,00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	376.954.550,00	556.060.065,00	316.434.447,00	-	-	376.954.550,00	528.085.050,00	289.318.950,00	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>6.988.814.273,00</b>	<b>2.337.272.151,00</b>	-	-	-	<b>1.610.938.100,00</b>	<b>2.156.362.009,00</b>	<b>5.647.113.321,00</b>	-	-	1	1	1	1	1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.627.614.273,00	1.360.522.951,00	-	-	-	720.420.000,00	1.189.423.900,00	4.122.963.495,00	-	-	1	1	1	1	1		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.361.200.000,00	976.749.200,00	-	-	-	890.518.100,00	966.938.109,00	1.524.149.826,00	-	-	1	1	1	1	1		
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	-	-	3.565.826.765,00	2.049.546.425,00	3.355.473.007,00	-	-	-	-	3.254.021.348,00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	1.054.750.000,00	883.500.000,00	972.870.000,00	-	-	1.054.750.000,00	874.836.444,00	970.652.882,00	1	1	1	1	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	68.870.000,00	68.870.000,00	-	-	-	68.870.000,00	53.017.800,00	-	1	1	1	1	1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	2.017.696.765,00	1.616.182.000,00	1.915.030.507,00	-	-	2.017.696.765,00	1.523.406.991,00	1.860.650.950,00	1	1	1	1	1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	424.510.000,00	148.370.000,00	467.572.500,00	-	-	424.510.000,00	88.251.699,00	422.717.516,00	1	1	1	1	1		
<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	-	-	-	151.546.000,00	151.546.000,00	-	-	-	-	146.469.788,00	1	1	1	1	1		
Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	151.546.000,00	-	-	-	-	146.469.788,00	1	1	1	1	1		
<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	-	-	5.943.001.308,00	452.936.313,00	6.544.897.418,00	-	-	5.943.001.308,00	-	6.306.593.005,00	1	1	1	1	1		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	1.615.346.000,00	1.195.097.313,00	3.365.631.600,00	-	-	1.615.346.000,00	1.182.110.000,00	3.278.610.000,00	1	1	1	1	1		
Pengadaan Mebel	-	-	1.036.200.163,00	198.000.000,00	374.056.500,00	-	-	1.036.200.163,00	196.845.000,00	370.625.000,00	1	1	1	1	1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	2.339.672.163.00	1.981.559.101.00	2.043.518.622.00	-	-	2.339.672.163.00	1.904.773.000.00	1.921.707.000	1	1	1	1	1		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	951.782.982.00	625.281.000.00	761.690.696.00	-	-	951.782.982.00	473.764.010.00	735.651.005.00	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>122.750.000.00</b>	<b>133.020.000.00</b>	<b>232.172.020.00</b>	<b>52.059.000.00</b>	<b>612.570.230.00</b>	<b>122.750.000.00</b>	<b>132.700.000.00</b>	<b>232.172.020.00</b>	<b>374.914.000.00</b>	<b>605.520.000.00</b>	1	1	1	1	1		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	122.750.000,00	133,020,000,00	232,172,020,00	376,625,406,00	612,570,230,00	122,750,000,00	132,700,000,00	232,172,020,00	374,914,000,00	605,520,000,00	1	1	1	1	1		
<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	-	-	<b>487.484.850.00</b>	<b>1.135.163.500.00</b>		-	-	<b>487.484.850.00</b>			1	1	1	1	1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	77.806.700.00	187.258.000.00	251.820.000.00	-	-	77.806.700.00	109.451.240.00	145.250.000.00	1	1	1	1	1		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	241.369.075.00	246.747.850.00	308.439.550.00	-	-	241.369.075.00	118.777.486.00	198.600.000.00	1	1	1	1	1		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	168.309.075.00	894.533.650.00	1.002.198.950.00	-	-	168.309.075.00	733.396.460.00	695.386.000.00	1	1	1	1	1		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	59.695.150.00	-	-	-	-	37.131.200.00	1	1	1	1	1		
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	114.115.280.00	-	-	-	-	71.017.150.00	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>255.075.000.00</b>	<b>562,125,000,00</b>	-	-	-	<b>485,367,300,00</b>	<b>509,009,500,00</b>	-	-	-	1	1	1	1	1		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	131.700.000,00	292,050,000,00	-	-	-	361,762,300,00	291,580,000,00	-	-	-	1	1	1	1	1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	123.375.000,00	270,075.000.00	-	-	-	123.605.000.00	217,429.500.00	-	-	-	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM KUALITAS Peningkatan Perencanaan Program</b>	<b>854.339.800.00</b>	<b>1,160,451,850.00</b>	-	-	-	<b>1,460,634,050.00</b>	<b>1,125,374,207.00</b>	-	-	-	1	1	1	1	1		
Penyusunan Rencana dan Program SKPD	166.750.000,00	250,802,000.00	-	-	-	315,402,500.00	246,671,000.00	-	-	-	1	1	1	1	1		
Pengembangan Data Base	19.819.800,00	118,037,750.00	-	-	-	86,104,400.00	103,460,607.00	-	-	-	1	1	1	1	1		
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	667.770.000,00	791,612,100.00	-	-	-	1,059,127,150.00	775,242,600.00	-	-	-	1	1	1	1	1		
<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	-	-	<b>1.216.724.050.00</b>	<b>962.488.321.00</b>	<b>1.270.002.863.00</b>	-	-	<b>1.216.724.050.00</b>		<b>1.195.174.486.00</b>	1	1	1	1	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	222.625.000.00	233.219.700.00	227.808.321.00	-	-	222.625.000.00	215.118.151.00	199.280.328.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	-	-	55.423.375.00	106.858.000.00	95.577.000.00	-	-	55.423.375.00	104.122.400.00	88.475.000.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	-	-	71.409.750.00	102.437.000.00	110.630.000.00	-	-	71.409.750.00	87.064.700.00	92.620.000.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	-	-	77.566.350.00	104.175.000.00	106.195.800.00	-	-	77.566.350.00	95.911.450.00	101.090.800.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	-	-	138.758.500.00	126.242.000.00	95.906.000.00	-	-	138.758.500.00	109.604.250.00	82.133.150.00	1	1	1	1	1		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	650.941.075.00	681.034.750.00	633.885.742.00	-	-	650.941.075.00	666.313.465.00	631.575.208.00	1	1	1	1	1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>	297.070.000.00	189,164,000.00	-	-	-	-	171,317,200.00	142,618,500.00	-	-	1	1	1	1	1		
Pelaksanaan Manajemen Keuangan Dan Aset	297.070.000,00	189,164,000,00	-	-	-	-	171,317,200,00	142,618,500,00	-	-	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b>	514.050.000.00	227,667,880.00	-	-	-	-	216,902,000.00	201,463,500.00	-	-	1	1	1	1	1		
Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian Dan Umum	514.050.000,00	227,667,880,00	-	-	-	-	216,902,000,00	201,463,500,00	-	-	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ANGGARAN DAERAH</b>	4.272.740.000.00	3,692,470,723.00	4.859.503.200.00	4.748.835.150.00	6.442.360.260.00	3,029,855,520.00	3,529,311,058.00	3,556,848,616.00			1	1	1	1	1		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1.607.708.400,00	1,655,879,399,00	962,951,675,00	1,131,935,462,00	2,308,415,700,00	1,997,751,178,00	1,600,680,830,00	1,576,139,250,00	1,125,193,068,00	2,293,674,057,00	1	1	1	1	1		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	946.592.000,00	940,912,568,00	962,951,675,00	1,131,935,462,00	939,421,750,00	1,032,104,342,00	932,472,770,00	820,306,360,00	1,125,193,068,00	935,352,361,00	1	1	1	1	1		
Peningkatan Manajemen Anggaran Daerah dan Pengesahan Dokumen Anggaran	933.568.000,00	677,903,526,00	-	-	-	933,568,000,00	677,903,526,00	-	-	-	1	1	1	1	1		
Pembinaan dan Evaluasi Rancangan APBD/Perubahan APBD Kab/Kota	784.871.600,00	417,775,230,00	-	-	-	784,871,600,00	417,775,230,00	-	-	-	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	-	705.455.725.00	1.017.398.450.00	682.918.625.00	-	-	705.455.725.00	1.009.382.376.00	676.861.047.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	318.636.875.00	286.911.775.00	444.402.750.00	-	-	318.636.875.00	281.412.339.00	443.081.740.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	-	-	369.080.000.00	453.550.000.00	631.636.550.00	-	-	369.080.000.00	450.499.150.00	624.415.650.00	1	1	1	1	1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	-	-	105.730.000.00	117.550.000.00	-	-	-	105.730.000.00	116.495.700.00	-	1	1	1	1	1		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	-	-	130.142.025.00	174.524.650.00	208.674.150.00	-	-	130.142.025.00	174.390.600.00	207.199.850.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	-	-	170.585.750.00	135.135.025.00	-	-	-	170.585.750.00	135.023.175.00	-	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	396.522.500.00	650.335.000.00	-	-	-	396.522.500.00	497.106.900.00	-	1	1	1	1	1		
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	-	-	730.446.975.00	719.981.400.00	1.226.890.725.00	-	-	730.446.975.00	701.268.600.00	1.038.531.638.00	1	1	1	1	1		
<b>PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-	<b>930.800.250.00</b>	<b>830.433.850.00</b>	<b>1.662.241.300.00</b>	-	-	<b>930.800.250.00</b>		<b>1.621.591.547.00</b>	1	1	1	1	1		
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	-	-	505.697.250.00	637.120.700.00	1.116.710.550.00	-	-	505.697.250.00	631.821.540.00	1.095.037.328.00	1	1	1	1	1		
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	-	-	425.103.000.00	546.183.175.00	545.530.750.00	-	-	425.103.000.00	540.464.075.00	526.554.219.00	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM DAN PENGEMBANGAN PERBENDAHARAAN DAERAH</b>	<b>2.650.000.000.00</b>	<b>2.624,761,937.00</b>	-	-	-	<b>2,587,103,600.00</b>	<b>1,802,570,250.00</b>	-	-	-	1	1	1	1	1		
Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	1.113.930.350.00	689,170,237.00	-	-	-	679,645,600.00	514,936,900.00	-	-	-	1	1	1	1	1		
Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung	772.156.150.00	792,492,300.00	-	-	-	765,380,700.00	715,010,200.00	-	-	-	1	1	1	1	1		
Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	763.913.500.00	1,143,099,400.00	-	-	-	1,142,077,300.00	572,623,150.00	-	-	-	1	1	1	1	1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	-	-	4.176.881.050.00	3.866.602.505.00				4.176.881.050.00			1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	464.193.525.00	523.466.550.00	529.591.900.00	-	-	464.193.525.00	522.462.122.00	511.765.450.00	1	1	1	1	1		
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas da SPD	-	-	599.344.775.00	726.596.260.00	883.590.485.00	-	-	599.344.775.00	725.089.981.00	883.582.300.00	1	1	1	1	1		
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-	-	749.484.350.00	856.836.755.00	815.876.046.00	-	-	749.484.350.00	854.169.435.00	798.672.014.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pertimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	-	322.478.850.00	394.445.000.00	1.422.858.000.00	-	-	322.478.850.00	394.338.300.00	1.416.940.000.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	291.979.775.00	305.023.500.00	139.190.230.00	-	-	291.979.775.00	304.963.500.00	139.190.000.00	1	1	1	1	1		
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	-	-	315.126.750.00	283.615.000.00	397.740.000.00	-	-	315.126.750.00	283.565.000.00	397.644.900.00	1	1	1	1	1		
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-	589.337.125.00	881.625.000.00	860.510.350.00	-	-	589.337.125.00	879.105.000.00	835.270.350.00	1	1	1	1	1		
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	844.935.900.00	845.760.000.00	1.029.535.900.00	-	-	844.935.900.00	829.263.284.00	1.006.985.900.00	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH</b>	<b>3.049.999.758.00</b>	<b>3.627.196.780.00</b>	<b>3.882.913.575.00</b>	<b>3.557.582.743.00</b>		<b>3.444.801.945.00</b>	<b>2.752.757.637.00</b>	<b>2.854.422.828.00</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	1.091.116.305.00	1.274.925.750.00	780.225.400.00	1.198.919.026.00	1.473.249.500.00	1.234.777.760.00	905.171.862.00	1.000.976.273.00	1.190.591.888.00	1.376.640.796.00	1	1	1	1	1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	709.984.453,00	581.590.198,00	1.021.520.975,00	1.258.242,00	1.397.114.725,00	565.005.290,00	551.258.375,00	560.549.955,00	1.238.203.504,00	1.285.321.222,00	1	1	1	1	1		
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Manajemen	427.841.625,00	788.555.992,00	894.830.500,00	833.385,00	1.070.163.893,00	684.585.565,00	538.443.400,00	428.525.600,00	831.556.114,00	1.034.688.648,00	1	1	1	1	1		
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	821.057.375,00	982.124.840,00	1.186.336.700,00	1.277.058.750,00	1.384.391.634,00	960.433.330,00	757.884.000,00	864.371.000,00	1.234.784.591,00	1.350.972.690,00	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>3.046.743.242,00</b>	<b>4.477.217.860,00</b>	<b>4.564.925.167,00</b>	<b>5.304.516.391,00</b>		<b>4.122.518.975,00</b>	<b>3.133.478.000,00</b>	<b>2.153.668.850,00</b>			1	1	1	1	1		
Penyusunan Standar Satuan Harga	296.968.000,00	344.130.000,00	252.366.267,00	257.079.623,00	303.009.700,00	232.445.000,00	194.311.250,00	191.025.700,00	227.527.150,00	291.146.800,00	1	1	1	1	1		
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset	366.546.400,00	206.700.000,00	234.195.000,00	200.000.000,00	292.884.200,00	135.349.000,00	173.828.150,00	238.535.750,00	174.866.650,00	282.137.500,00	1	1	1	1	1		
Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah	660.252.850,00	730.000.000,00	923.965.950,00	994.052.200,00	1.114.931.100,00	704.557.225,00	253.440.550,00	375.283.200,00	905.119.400,00	1.003.569.850,00	1	1	1	1	1		
Peningkatan Manajemen Aset Daerah	1.159.527.650,00	2.721.905.360,00	245.566.900,00	718.917.150,00	369.978.350,00	2.631.368.200,00	2.257.855.250,00	1.058.361.000,00	701.702.450,00	361.060.850,00	1	1	1	1	1		
Pemindahtanganan Aset Daerah	563.448.342,00	474.482.500,00	290.463.200,00	-	-	418.799.550,00	254.042.800,00	290.463.200,00	-	-	1	1	1	1	1		
Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	561.366.925,00	671.619.150,00	649.406.650,00	-	-	561.366.925,00	600.536.900,00	635.795.900,00	1	1	1	1	1		
Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	895.097.500,00	963.735.878,00	1.650.007.250,00	-	-	895.097.500,00	946.699.000,00	1.525.184.549,00	1	1	1	1	1		
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	417.654.900,00	291.575.500,00	222.500.000,00	-	-	417.654.900,00	260.236.650,00	214.931.500,00	1	1	1	1	1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	300.000.000.00	355.274.500.00	204.666.000.00	-	-	300.000.000.00	327.437.450.00	195.585.450.00	1	1	1	1	1		
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	131.905.500.00	131.905.500.00	131.905.500.00	-	-	131.905.500.00	131.585.500.00	131.905.500.00	1	1	1	1	1		
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	220.836.850.00	220.836.850.00	239.380.900.00	-	-	220.836.850.00	207.702.450.00	234.352.100.00	1	1	1	1	1		
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	381.969.375.00	108.143.100.00	-	-	-	381.969.375.00	95.812.250.00	-	1	1	1	1	1		
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>368.620.000,00</b>	<b>440.100.000,00</b>	-	-	-	<b>368.620.000,00</b>	<b>440.100.000,00</b>	-	-	-	1	1	1	1	1		
Penyelesaian TP-TGR	368.620.000,00	440.100.000,00	-	-	-	368.620.000,00	440.100.000,00	-	-	-	1	1	1	1	1		
<b>PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	-	-	<b>640.207.204.515,00</b>	<b>681.359.524.847,00</b>	<b>842.924.762.649,00</b>	-	-	<b>640.207.204.515,00</b>	<b>730.792.173.705,00</b>	<b>830.704.029.234,00</b>	1	1	1	1	1		
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan dan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	179.619.400.00	164.958.300.00	-	-	-	179.619.400.00	157.650.000.00	-	1	1	1	1	1		
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	-	640.027.585.115,00	767.333.963.976,00	842.924.762.649,00	-	-	640.027.585.115,00	730.634.523.705,00	830.704.029.234,00	1	1	1	1	1		

## 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan BPKAD

Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BPKAD) adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari layanan yang diberikan. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran pelayanan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah :

### 1) Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah pengguna anggaran yang memerlukan pelayanan dari BPKAD terkait dengan Proses Perencanaan Penganggaran dan Penatausahaan SP2D di BUD, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta pengelolaan aset/ barang milik daerah.

### 2) Pimpinan Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membutuhkan Laporan dan informasi dalam rangka melaksanakan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengambilan keputusan strategis dan penyusunan kebijakan fiskal.

### 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD membutuhkan Laporan pertanggungjawaban keuangan, Data anggaran dan realisasi Laporan keuangan dan aset daerah serta data dan Informasi lainnya yang diperlukan.

### 4) Masyarakat Umum

Masyarakat sebagai penerima manfaat dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat berhak atas informasi publik mengenai APBD, Penggunaan dana publik serta Aset yang dikelola Pemerintah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

### 5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BPK melakukan audit atas laporan keuangan daerah, dan membutuhkan Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dan Dokumen pendukung pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

### 6) Pemerintah Kabupaten/Kota

Sasaran pelayanan BPKAD kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam bentuk evaluasi APBD, evaluasi perubahan APBD dan evaluasi pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota, serta penyaluran dana bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.

### 7) Pihak Ketiga/ Rekanan

Setiap para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan Pencairan SP2D.

- 8) Lembaga Pemerintah Lainnya (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, DJPK, Instansi Vertikal, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Lainnya.

#### **2.4.1 Mitra BPKAD dalam pemberian Pelayanan**

Secara Fungsi BPKAD menjalankan tugas membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan pengelolaan Barang Milik Daerah terus berupaya dalam menjalin Kerjasama dengan mitra antara lain sebagai berikut :

- a. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI dalam hal Pengesahan APBD dan APBD-Perubahan dan Lain-lain.
- b. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI terkait dengan Penerimaan pendapatan.
- c. Perangkat Daerah dilingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Serta Pihak Lainnya yang membutuhkan Pelayanan yang urusan berkaitan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset

#### **2.4.2 Kerjasama dengan BUMD dalam pencapaian kinerja BPKAD**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalin Kerjasama dengan BUMD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi dalam Proses Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan dtetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 127 sampai dengan Pasal 129 dan ditindaklanjuti Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Penatausahaan Kas umum Daerah dilaksanakan Oleh Bendahara Umum daerah (BUD) Penatausahaan meliputi salah satunya adalah Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penempatan Dana ke Bank daerah maupun Konvensional dalam rangka investasi jangke pendek dalam mendukung serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah.

Berikut Kerjasama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan beberapa Lembaga Perbankan :

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

- 1) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang Penempatan dan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Nomor : 900.1.13/19.1/Pemprov. ST/2024 dan No. JRB.R.10.Ar.PAU/491/2024.
- 2) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Mega (Persero) tentang Penempatan dan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Nomor : 900.1.13/19.4/Pemprov.ST/2024 dan No. 003/PKS/BM/PLU/2024.
- 3) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tentang Penempatan dan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Nomor : 900.1.13/19.7/Pemprov.ST//2024
- 4) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tentang Penempatan dan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah No : 900.1.13/19.6/Pemprov.ST//2024 No. B.1050-KC/XII/RTL/06/2024
- 5) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) tentang Penempatan Keuangan Daerah No : 900.1.13/19.2/Pemprov.ST//2024 No. 03/1857-3/038.
- 6) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Kantor Cabang Moh. Yamin tentang Penempatan Keuangan Daerah No : 900.1.13/19.2/Pemprov.ST//2024 No. 04/764-3/8050.
- 7) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Penempatan dan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah No : 900.1.13/19.2/Pemprov.ST//2024 No. 04/764-3/8050.
- 8) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Kantor Cabang Palu tentang Pemberian Pembiayaan kepada Pegawai pada Lingkungan Pemerintah Prov. Sulteng No : BSI/04/001/PKS dan No. 100.2.3/1385/Ro. Pem.OTDA
- 9) Perjanjian Kerja Sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Kantor Cabang Palu tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah No : 900/257.07/BPKAD/XII/2024 dan 1227/BPD-ST/PKS/DIR/PMSR/XVII/2024.

## 2.5 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis lainnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam mengemban tugas dan menjalankan fungsi pelayanannya, BPKAD dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya seperti yang tergambar pada matriks pemetaan berikut ini:

**Tabel 2.8**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Rumusan Isu
<b>Sumber Daya Manusia</b>	Masih terbatasnya pegawai yang memiliki kapabilitas	Perkembangan teknologi, informasi dan aplikasi yang begitu cepat	Kebutuhan peningkatan kualitas SDM BPKAD yang adaptif terhadap teknologi dan mampu mengelola keuangan serta aset daerah secara profesional dan akuntabel
<b>Sarana dan Prasarana Kantor</b>	Sarana dan prasarana perkantoran yang kurang memadai, ruang kerja terbatas	Kapasitas gedung kantor tidak sesuai dengan jumlah pegawai	Modernisasi dan pengembangan sarana serta ruang kerja yang memadai sesuai kebutuhan organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan BPKAD
<b>Tindak Lanjut Temuan Audit</b>	Percepatan tindak lanjut serta penyelesaian hasil temuan pemeriksaan	Kurangnya perhatian dari pihak ketiga, perangkat daerah/stakeholder dalam penyelesaian tindak lanjut	Penguatan mekanisme koordinasi, pengawasan, dan percepatan penyelesaian temuan audit baik internal maupun eksternal yang berdampak pada akuntabilitas keuangan daerah
<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Lambatnya proses pengelolaan keuangan daerah	Perubahan regulasi dan kebijakan	Percepatan adaptasi regulasi dan kebijakan baru serta optimalisasi proses pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi dan perbaikan sistem perencanaan
<b>Pelaporan Keuangan Perangkat</b>	Laporan keuangan masing-masing perangkat daerah belum akuntabel	Kurangnya pemahaman pengelola laporan keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintah	Peningkatan pemahaman dan kapasitas pengelola laporan keuangan perangkat daerah untuk

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Rumusan Isu</b>
<b>Daerah</b>	dan tepat waktu	(SAP)	menyusun laporan yang berkualitas dan tepat waktu
<b>Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan</b>	Sistem informasi pengelolaan keuangan dan Barang MD belum terintegrasi	Modul BMD belum terintegrasi ke perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban	Pengembangan dan penerapan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan BMD
<b>Koordinasi Pengelolaan BMD</b>	Koordinasi pengelolaan BMD dengan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal	Inventarisasi dan pengamanan BMD tetap belum maksimal, belum tertibnya pengamanan BMD, dokumen lahan belum lengkap	Penguatan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan BMD serta optimalisasi inventarisasi dan pengamanan aset dengan dokumen yang lengkap dan valid

Secara spesifik, identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh BPKAD dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Layanan Administrasi Perkantoran

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam layanan administrasi perkantoran adalah

- a. Sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan
- b. Sarana dan prasarana perkantoran yang masih perlu ditingkatkan
- c. Percepatan Tindakan lanjut atas rekomendasi Hasil temuan pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta penyelesaian temuan kerugian daerah yang masih perlu ditingkatkan

2. Perbendaharaan Keuangan Daerah

Adapun identifikasi masalah yang dihadapi dalam penatausahaan keuangan adalah:

- a. Sistem sering mengalami Error, server down, lambat dalam merespon
- b. SIPD yang masih dalam pengembangan dapat menyebabkan perubahan dan sering terjadinya error.
- c. SP2D Online masih banyak terjadi masalah dibendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

3. Pelaporan Keuangan Daerah

Adapun identifikasi masalah yang dihadapi dalam Pelaporan Keuangan Daerah adalah

- a. Perubahan regulasi yang begitu dinamis dan cepat
- b. Pembinaan kepada perangkat daerah dalam hal penerapan akuntansi berbasis akrual (accrual basis) sehingga didapatkan laporan keuangan masing-masing perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu dalam penyajiannya
- c. Masih kurangnya pemahaman aparat pengelola keuangan daerah dalam hal Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

4. Pengelolaan Aset Daerah

Adapun identifikasi masalah yang dihadapi dalam Pelaporan Keuangan Daerah adalah

- a. Pejabat pengelola BMD pada perangkat daerah yang sering berganti
- b. Aset Tanah Negara Milik Pemprov Sulawesi Tengah yang belum teroptimalkan
- c. Sinkronisasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari perencanaan, penghapusan, penatausahaan aset dan laporan BMD
- d. Implementasi penatausahaan aset berbasis akuntansi akrual
- e. Pemahaman ASN daerah yang belum menyeluruh dengan pengelolaan BMD
- f. Tanah P3D SMU/ SKM dan tanah dibawah jalan sebagian besar belum memiliki sertifikat.

## 2.6 Telaahan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Penelaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction).

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan maka visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut : “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, ditempuh melalui 4 (Empat) misi. Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilakukan dalam upaya

mencapai visi yang telah ditetapkan. Kesembilan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja
2. Mewujudkan masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kerkeadilan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sector.
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah tyang Tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan local.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025- 2029. Misi terkait dengan tugas Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan local. Secara jelas terkait Tugas dan Fungsi PD adalah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) Tahun kedepan khususnya Misi 4, yaitu; **Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang Tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan lokal**

Seiring tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan unsur pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perwujudan pelaksanaan visi dan misi di wujudkan dalam 2 program prioritas BPKAD yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Secara internal, dalam mendukung capaian misi 2, maka BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa meningkatkan pelayanan kepada stakeholder maupun masyarakat melalui 1 program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

**TABEL 2.9  
TELAAH VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

NO	VISI DAN MISI	TUPOKSI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	2	3	4	5
I	Visi : Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029	- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi	- Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	- Secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan Bimtek, Workshop, desiminasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah
II	Misi : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang Tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan local		- Cepatnya perubahan peraturan/ perundang-undangan dipusat sehingga daerah perlu menginternalisasikan kembali dgn kebijakan baru	- Melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap perubahan peraturan/ perundang-undangan

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERMASALAHAN**  
**BPKAD**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada RPJMD 2025 – 2029, dapat yang disajikan berikut ini :

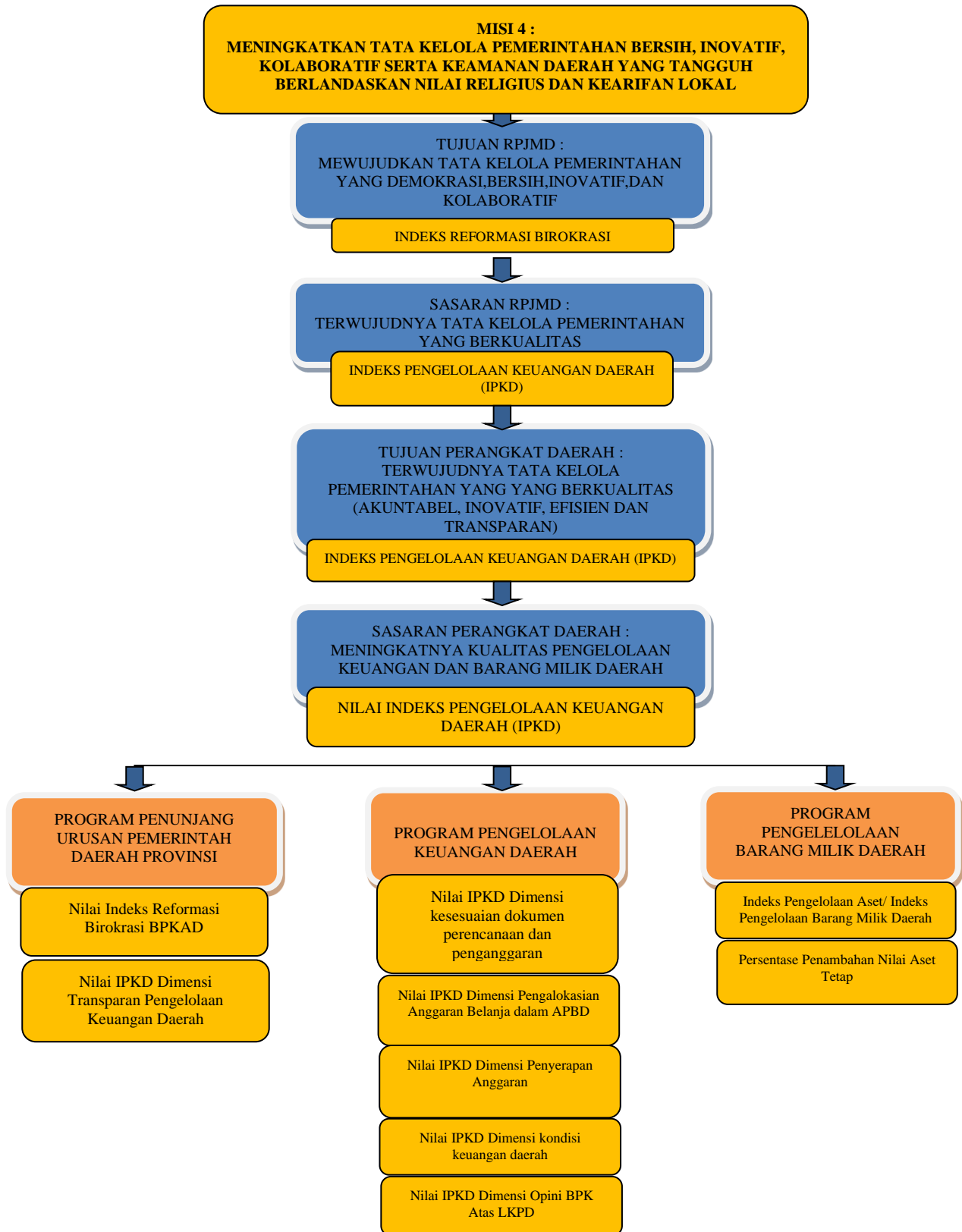
**3.1.1 Tujuan**

Implementasi atau penjabaran dari misi dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus ditunjukkan melalui suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan keuangan dan Aset (BPKAD) Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dengan rumusan **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)”**

**3.1.2 Sasaran**

Sasaran merupakan ukuran kinerja dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 untuk masa waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 telah menetapkan sasaran yaitu **“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah”**

**CASCADING RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH 2025-2029

## PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD
- Nilai IPKD Dimensi Transparan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	
6 (Enam) Sub Kegiatan	
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
<b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>	
8 (Delapan) Sub Kegiatan	
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGULIAH/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN SKPD AKHIR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
<b>Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	
4 (Empat) Sub Kegiatan	
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum</b>	
5 (Lima) Sub Kegiatan	
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGGARAN	Jumlah barang cetakan dan penggangan yang Disediakan
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
4 (Empat) Sub Kegiatan	
PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
PENGADAAN MEUBEL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
PENGADAAN GEDUNG KANTOR BANGUNAN ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2 (Dua) Sub Kegiatan	
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan yang Disediakan

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
4 (Empat) Sub Kegiatan	
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DONAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DA PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DA PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH 2025-2029

## PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
- Nilai IPKD Dimensi Penyerapan Anggaran
- Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah
- Nilai Dimensi Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD)

KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	KEGIATAN URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran Yang Tersusun</li> <li>• Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Tersusun</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Persentase Kabupaten/Kota yang dievaluasi terkait perencanaan Anggaran Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan keuangan belanja langsung daerah yang disusun tepat waktu</li> <li>• Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan keuangan belanja tidak langsung daerah yang disusun tepat waktu</li> <li>• Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Tersusun</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures); Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern</p>	<p style="text-align: center;">Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan</p>																																																
7 (Tujuh) Sub Kegiatan	2 (Dua) Sub Kegiatan	8 (Delapan) Sub Kegiatan	4 (Empat) Sub Kegiatan	3 (Tiga) Sub Kegiatan																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang Disusun                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA SKPD                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN VERIFIKASI DPA SKPD                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     PEMBINAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                 </td> </tr> </table>	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang Disusun	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	KOORDINASI DAN VERIFIKASI DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PEMBINAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                 </td> </tr> </table>	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENJELAJAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     PENATAUSAHAAN DAERAH                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIBANDAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                 </td> </tr> </table>	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENJELAJAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	PENATAUSAHAAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIBANDAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELAJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                 </td> </tr> </table>	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELAJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI                 </td> <td style="padding: 5px;">                     Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                 </td> </tr> </table>	ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang Disusun																																																			
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang Disusun																																																			
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi																																																			
KOORDINASI DAN VERIFIKASI DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi																																																			
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																																																			
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																																																			
PEMBINAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi																																																			
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																																																			
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																																																			
KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																																																			
PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENJELAJAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																																																			
PENATAUSAHAAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah																																																			
KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIBANDAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																																																			
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																																																			
KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																																																			
REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																																																			
PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																																																			
REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELAJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																																																			
KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi																																																			
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																																																			
PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																																																			
ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																																																			
PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																																																			
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																																																			

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**



- Indeks Pengelolaan Aset/ Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD/IPA)
  - Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap



<b>KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun</li> <li>• Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun</li> <li>• Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang Disusun</li> </ul>	
11 (Sebelas) Sub Kegiatan	
PENYUSUNAN STANDAR HARGA	Jumlah Standar Harga yang Disusun
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
PENATAUSHAHAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDATANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

**TABEL 3.1**  
**PERUBAHAN TUJUAN/SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	78,32	78,92	79,42	80	81,02	82,01

## 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.2.1 Analisis SWOT

Demi terwujudnya kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

Analisis SWOT merupakan salah satu alat analisis untuk menentukan strategi yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai, untuk menjalankan tugas dan fungsi BPKAD secara efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi. Hal ini penting untuk menentukan faktor kunci keberhasilan organisasi. Lingkungan internal dalam lingkup BPKAD merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun dapat dikendalikan secara langsung dan relatif lebih mudah. Sementara, lingkungan cenderung sulit dikendalikan. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, identifikasi lingkungan internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat dirangkum sebagai berikut :

#### A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Kuantitas/jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
2. Posisi Strategis sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengevaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota
3. Memiliki sistem informasi yang cukup memadai untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### B. Kelemahan (*Weakness*)

1. Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan
2. Terbatasnya kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi.
3. Kurangnya kualitas SDM yang memiliki yang memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan tupoksi setiap bidang.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
5. Belum diterapkannya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur

**C. Peluang (*Opportunities*)**

1. Fungsi strategis dalam rangka fasilitasi OPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah
2. Kewenangan mengatur dan realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan kepada Kabupaten/Kota melalui fungsi evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja
5. Tuntutan masyarakat untuk pelaksanaan *good governance* dan transparansi.

**D. Ancaman (*Threats*)**

1. Kelancaran pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait dengan kewenangan Pemerintah pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota serta perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.
3. Inkonsistensi dan tidak sinerginya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
4. Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan struktur organisasi.
5. Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dilakukan analisis untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi berbagai faktor kelemahan yang ada dan menghindari ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Matriks SWOT disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<p>sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengevaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota</p> <p>3. Memiliki Sarana dan prasarana serta sistem informasi yang cukup memadai untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan aset daerah</p>	<p>dan aset daerah</p> <p>2. Mengoptimalkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dan melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintahan Provinsi Sulteng serta koordinasi dgn pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Perbaiki tata kelola pengelolaan Keuangan dan aset berbasis online dan Fasilitas sarana prasarana penunjang kinerja aparatur.</p>	<p>Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual</p> <p>2. Meningkatkan jumlah SDM yang menguasai implementasi UU 23 Tahun 2014 dan perubahan-perubahan regulasi yang terkait dengan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah.</p> <p>3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana informasi yang dapat menjaga konsistensi program dan kegiatan yang bersentuhan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p>
<p><i>Kelemahan:</i></p> <p>1. Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan</p> <p>2. Terbatasnya kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>3. Kurangnya kualitas SDM yang memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan tupoksi setiap bidang.</p> <p>4. Kurangnya sarana dan prasarana</p> <p>5. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien</p> <p>6. Belum diterapkannya</p>	<p><i>Alternatif Strategi :</i></p> <p>1. Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih inten dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait</p> <p>2. Secara bertahap dan berkelanjutan memberikan pemahaman dan motivasi melalui pembinaan pegawai</p> <p>3. Melakukan pemetaan kapasitas dan kemampuan pegawai dan pemerataan distribusi pegawai sesuai beban tugas dan kompleksitas permasalahan pada BPKAD</p>	<p><i>Alternatif Strategi :</i></p> <p>1. Melakukan sosialisasi teknis terhadap perubahan kebijakan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan di OPD</p> <p>2. Membangun sinergitas antar organisasi/unit organisasi dan antar pegawai melalui kegiatan bersama, tukar pikir dan pengembangan potensi dengan melibatkan tenaga profesional</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan intensitas pelaksanaan bimtek, pelatihan, dan kursus-kursus.</p>

<i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja aparatur		
---	--	--

Hasil analisis SWOT memberikan alternatif strategi untuk meningkatkan kekuatan dan peluang dan mengeliminir kelemahan dan ancaman dengan mengimplementasikan strategi. Strategi yang akan diimplementasikan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### 3.3 Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan strategi dan kebijakan, antara lain :

#### A. Strategi

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Tahap I (2026) Pemetaan capaian IPKD pada 6 dimensi, penyusunan rencana aksi perbaikan, dan penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan di Perangkat Daerah
2. Tahap II (2027) Implementasi penganggaran berbasis kinerja dan penataan dokumen perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan RKPD dan SIPD
3. Tahap III (2028) Digitalisasi penuh pengelolaan keuangan melalui SIPD terintegrasi, termasuk transparansi laporan keuangan dan realisasi anggaran public
4. Tahap IV (2028) Optimalisasi penyerapan anggaran tepat waktu, efisiensi belanja, dan penerapan pengendalian intern berbasis risiko pada seluruh Perangkat Daerah
5. Tahap V (2028) Pelembagaan manajemen keuangan daerah berbasis kinerja dan akuntabilitas untuk menjaga dan meningkatkan skor IPKD secara berkelanjutan

#### B. Kebijakan

Arah kebijakan yang dirumuskan didalam pencapaian visi misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut ;

1. Pengoptimalan penerapan sistem informasi keuangan daerah secara real time dan terintegrasi

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

2. Pengembangan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan
3. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan**

<b>VISI : Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</b>			
<b>MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap I (2026) Pemetaan capaian IPKD pada 6 dimensi, penyusunan rencana aksi perbaikan, dan penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan di Perangkat Daerah</li> <li>2. Tahap II (2027) Implementasi penganggaran berbasis kinerja dan penataan dokumen perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan RKPD dan SIPD</li> <li>3. Tahap III (2028) Digitalisasi penuh pengelolaan keuangan melalui SIPD terintegrasi, termasuk transparansi laporan keuangan dan realisasi anggaran public</li> <li>4. Tahap IV (2028) Optimalisasi penyerapan anggaran tepat waktu, efisiensi belanja, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoptimalan penerapan sistem informasi keuangan daerah secara real time dan terintegrasi</li> <li>2. Pengembangan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan</li> <li>3. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel</li> </ol>

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>penerapan pengendalian intern berbasis risiko pada seluruh Perangkat Daerah</p> <p>5. Tahap V (2028) Pelembagaan manajemen keuangan daerah berbasis kinerja dan akuntabilitas untuk menjaga dan meningkatkan skor IPKD secara berkelanjutan</p>	

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Renstra BPKAD**

Tahapan	Fokus Strategi Utama	Program/Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Target Tahunan (2025-2030)
<b>Tahap I (2026)</b>	Penguatan SDM dan Modernisasi Sarana Prasarana	Pelatihan SDM, Penyediaan sarana kerja, Pendataan BMD	Jumlah SDM terlatih, % sarana memadai	SDM terlatih 50%, sarana memadai 60%, inventaris aset 70%
<b>Tahap II (2027)</b>	Implementasi Aplikasi Keuangan Terintegrasi	Integrasi aplikasi keuangan, Percepatan tindak lanjut audit	% aplikasi terintegrasi, % audit ditindaklanjuti	60% aplikasi digunakan, 70% tindak lanjut audit
<b>Tahap III (2028)</b>	Penguatan Pengawasan, Digitalisasi Pelaporan dan BMD	Pengawasan keuangan, Digitalisasi pelaporan, Sertifikasi BMD	Indeks pengawasan, % digitalisasi laporan	Pengawasan 75%, laporan digital 80%, sertifikasi BMD 60%
<b>Tahap IV (2029)</b>	Pengamanan BMD dan Integrasi Sistem (Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban)	Pengamanan BMD, Integrasi sistem keuangan (Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban)	Tingkat pengamanan BMD	BMD aman 80%, Sistem terintegrasi
<b>Tahap V (2030)</b>	Inovasi Layanan, Monitoring Kinerja, Pengelolaan Risiko	Inovasi layanan, Evaluasi kinerja, Pengelolaan risiko	Indeks inovasi, Laporan evaluasi, Risiko berkurang	Inovasi meningkat 20%, evaluasi 100%, Risiko berkurang 15%

**Keterangan:**

- Strategi ini disusun dengan memperhatikan NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan, terutama peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dari 78,32 pada 2025 ke 82,01 pada 2030.
- Prioritas pembangunan tahunan diarahkan pada penguatan SDM, digitalisasi dan integrasi sistem, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi pendapatan dan pengamanan aset, disesuaikan dengan tahapan implementasi.

Dalam merumuskan arah kebijakan Renstra BPKAD tahun 2025-2029 yang beroperasi pada NSPK, harus selaras dengan arah kebijakan RPJMD. Berikut ini dipaparkan Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra BPKAD yang dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BPKAD**

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Akar Kebijakan Renstra BPKAD	Keterangan
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya dan teknologi serta integrasi sistem pengelolaan keuangan	Fokus pada perbaikan sistem, SDM, dan digitalisasi proses keuangan daerah
2	Pengelolaan Aset Daerah	Optimalisasi pengelolaan aset dan perlindungan aset daerah	Kurangnya kepastian hukum atas aset dan lemahnya pengawasan aset	Pensertifikatan aset, pengamanan aset, dan penerapan manajemen aset berkelanjutan
3	Pengembangan SDM Aparatur	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	SDM yang belum memadai dan belum siap menghadapi tantangan teknologi	Pelatihan, pengembangan kapasitas dan pembentukan budaya kerja profesional
4	Sarana dan Prasarana	Modernisasi sarana dan peningkatan fasilitas kerja	Sarana dan ruang kerja kantor terbatas dan kurang mendukung efisiensi kerja	Penyediaan infrastruktur kerja yang memadai dan mendukung digitalisasi kerja
5	Audit dan Tindak Lanjut	Mempercepat tindak lanjut hasil audit dan penyelesaian kerugian	Koordinasi antar lembaga yang belum optimal dan masih lambatnya penyelesaian temuan audit	Optimalisasi mekanisme koordinasi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut audit
6	Digitalisasi Sistem Informasi	Integrasi aplikasi perencanaan keuangan dan pengelolaan aset	Sistem informasi yang belum terintegrasi dan penggunaan aplikasi belum merata	Pengembangan sistem informasi terpadu yang handal untuk mendukung pengelolaan keuangan dan aset
7	Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Penguatan sinergi pengelolaan aset antar daerah	Koordinasi antar daerah dan perangkat pemerintah belum optimal	Pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif antar provinsi dan kabupaten/kota

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARANAAN BIDANG URUSAN**

Rencana program dan kegiatan adalah jabaran suatu kegiatan yang diutamakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan menjadi rencana pelaksanaan oleh yang memangku kepentingan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di dalam program kerja tersebut tercantum program prioritas yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencapaiannya dalam tahun yang telah ditentukan, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada hasil evaluasi, sehingga memiliki data baseline, untuk perkiraan kinerja capaian yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini :

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

**TABEL 4.2  
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
BPKAD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>							
- TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Nilai)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
				Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (Nilai)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
		Jumlah Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
				Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.1.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.1.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	
				Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tersusun, Persentase Kabupaten/Kota yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Indeks Pengelolaan Aset/ Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IIPA/IPBMD) (Indeks)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Jumlah Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )	5.02.03.1.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )	5.02.03.1.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )	5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Pengawasan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
					Nilai IPKD Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
					Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Persentase Capaian Realisasi APBD BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara BPKAD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Nilai Hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Nilai capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Nilai Keputusan Pencatatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pada SPSE	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan		Nilai IPKD Dimensi Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah (Nilai)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Nilai)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.1.03.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.03.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.1.03.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.1.03.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.03.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
				Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Belanja Langsung Yang Tersusun, Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Nilai IPKD Dimensi Opini BPK Atas LKPD (Nilai)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang di Susun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures), Patuh Terhadap Peraturan Perundang - Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.04.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.04.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.1.04.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

**Tabel 4.3**

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02 - KEUANGAN				1.260.693.416.768,9		1.457.670.351.135,07		1.563.963.826.047,76		1.683.281.183.225,26		1.767.621.000.443,43	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				539.199.747.052,9		624.420.059.657,01		662.787.659.527,5		708.388.409.209,33		752.118.556.703,59	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	85	85,3	539.199.747.052,9	85,7	624.420.059.657,01	86,2	662.787.659.527,5	86,8	708.388.409.209,33	87,5	752.118.556.703,59	
	Nilai IPKD Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	14,741	10		10		10		10		10		
5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				463.007.500		897.074.460		907.090.490		908.943.046		913.935.748	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	11	443.755.500	11	785.511.960	11	793.649.986	11	795.039.410	11	798.783.942	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	21	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.788.500		159.672.710		163.115.726		163.347.320		163.971.427		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	11	60.788.500	11	159.672.710	11	163.115.726	11	163.347.320	11	163.971.427		
5.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				32.539.000		57.082.250		58.021.252		58.252.818		58.876.903		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	32.539.000	1	57.082.250	1	58.021.252	1	58.252.818	1	58.876.903	
5.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				38.200.000		68.731.250		69.670.252		69.901.818		70.525.903	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	38.200.000	1	68.731.250	1	69.670.252	1	69.901.818	1	70.525.903	
5.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				27.150.000		61.131.250		62.070.252		62.301.818		62.925.903	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	27.150.000	1	61.131.250	1	62.070.252	1	62.301.818	1	62.925.903	
5.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				32.850.000		49.631.250		50.570.252		50.801.818		51.425.903	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	32.850.000	1	49.631.250	1	50.570.252	1	50.801.818	1	51.425.903	
5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				252.228.000		389.263.250		390.202.252		390.433.818		391.057.903	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	21	7	252.228.000	7	389.263.250	7	390.202.252	7	390.433.818	7	391.057.903	
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	19.252.000	1	111.562.500	1	113.440.504	1	113.903.636	1	115.151.806	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1		
5.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				9.626.000		55.781.250		56.720.252		56.951.818		57.575.903	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	9.626.000	1	55.781.250	1	56.720.252	1	56.951.818	1	57.575.903	
5.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				9.626.000		55.781.250		56.720.252		56.951.818		57.575.903	
Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	9.626.000	1	55.781.250	1	56.720.252	1	56.951.818	1	57.575.903	
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				533.023.161.955,01		613.978.592.253,01		652.294.859.999,5		697.882.641.966,33		741.577.840.653,59	
Persentase Capaian Realisasi APBD BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	138	100	532.805.000.855,01	100	613.469.119.487,01	100	651.784.135.231,5	100	697.371.608.444,33	100	741.065.975.017,59	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	100		100		100		100		100		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				532.399.747.053,01		612.920.059.657,01		651.227.563.384,5		696.813.492.827,33		740.503.698.830,59	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	138	100	532.399.747.053,01	100	612.920.059.657,01	100	651.227.563.384,5	100	696.813.492.827,33	100	740.503.698.830,59	
5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				264.140.000		306.681.666		309.185.675		309.494.429		310.326.543	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	100	264.140.000	100	306.681.666	100	309.185.675	100	309.494.429	100	310.326.543	
5.02.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25.951.250		51.041.666		52.293.668		52.602.422		53.434.536	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	25.951.250	1	51.041.666	1	52.293.668	1	52.602.422	1	53.434.536	
5.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				74.500.000		108.291.666		109.543.668		109.852.422		110.684.536	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	74.500.000	1	108.291.666	1	109.543.668	1	109.852.422	1	110.684.536	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				27.613.500		42.003.166		43.255.168		43.563.922		44.396.036	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	2	27.613.500	2	42.003.166	2	43.255.168	2	43.563.922	2	44.396.036	
5.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				13.049.052		41.041.666		42.293.668		42.602.422		43.434.536	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	1	13.049.052	1	41.041.666	1	42.293.668	1	42.602.422	1	43.434.536	
Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	100	218.161.100	100	509.472.766	100	510.724.768	100	511.033.522	100	511.865.636	
5.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				218.161.100		509.472.766		510.724.768		511.033.522		511.865.636	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	100	218.161.100	100	509.472.766	100	510.724.768	100	511.033.522	100	511.865.636	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				85.327.050		133.611.965		141.123.980		142.976.507		147.969.191	
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	85.327.050	1	133.611.965	1	141.123.980	1	142.976.507	1	147.969.191	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	2		2		2		2		2		
5.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		15.583.333		18.087.338		18.704.847		20.369.075	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	12.000.000	2	15.583.333	2	18.087.338	2	18.704.847	2	20.369.075	
5.02.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.927.050		58.410.383		60.914.388		61.531.897		63.196.125	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	35.927.050	1	58.410.383	1	60.914.388	1	61.531.897	1	63.196.125	
5.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				37.400.000		59.618.249		62.122.254		62.739.763		64.403.991	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	2	37.400.000	2	59.618.249	2	62.122.254	2	62.739.763	2	64.403.991	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				306.918.700		734.126.196		742.890.215		744.742.739		749.735.423	
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara BPKAD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	100	92.171.650	100	230.438.148	100	235.446.161	100	236.372.423	100	238.868.765	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	138		138		138		138		138		
5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				31.912.500		101.041.666		103.545.675		103.854.429		104.686.543	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	138	31.912.500	138	101.041.666	138	103.545.675	138	103.854.429	138	104.686.543	
5.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				22.251.150		42.992.816		44.244.818		44.553.572		45.385.686	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	100	22.251.150	100	42.992.816	100	44.244.818	100	44.553.572	100	45.385.686	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				38.008.000		86.403.666		87.655.668		87.964.422		88.796.536	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	38.008.000	5	86.403.666	5	87.655.668	5	87.964.422	5	88.796.536	
Nilai Hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	135	43.175.500	135	64.018.166	135	65.270.168	135	65.578.922	135	66.411.036	
5.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				43.175.500		64.018.166		65.270.168		65.578.922		66.411.036	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	135	43.175.500	135	64.018.166	135	65.270.168	135	65.578.922	135	66.411.036	
Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	100	171.571.550	100	439.669.882	100	442.173.886	100	442.791.394	100	444.455.622	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	29		29		29		29		29		
5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70.521.550		144.895.216		146.147.218		146.455.972		147.288.086	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	100	70.521.550	100	144.895.216	100	146.147.218	100	146.455.972	100	147.288.086	
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				101.050.000		294.774.666		296.026.668		296.335.422		297.167.536	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	29	101.050.000	29	294.774.666	29	296.026.668	29	296.335.422	29	297.167.536	
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				656.571.354,89		1.056.420.561		1.063.932.578		1.065.785.103		1.070.777.788	
Nilai capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14	100	493.672.000	100	809.642.000	100	810.894.002	100	811.264.507	100	812.263.044	
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				493.672.000		809.642.000		810.894.002		811.264.507		812.263.044	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14	100	493.672.000	100	809.642.000	100	810.894.002	100	811.264.507	100	812.263.044	
Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	162.899.354,89	1	246.778.561	1	253.038.576	1	254.520.596	1	258.514.744	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	100		100		100		100				

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.993.910		40.671.677		43.175.686		43.546.191		44.544.728	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	36.993.910	1	40.671.677	1	43.175.686	1	43.546.191	1	44.544.728	
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.082.400		80.164.400		81.416.402		81.786.907		82.785.444	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5	57.082.400	5	80.164.400	5	81.416.402	5	81.786.907	5	82.785.444	
5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.349.900		36.612.901		37.864.903		38.235.408		39.233.945	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	16.349.900	1	36.612.901	1	37.864.903	1	38.235.408	1	39.233.945	
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				52.473.144,89		89.329.583		90.581.585		90.952.090		91.950.627	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	100	52.473.144,89	100	89.329.583	100	90.581.585	100	90.952.090	100	91.950.627	
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				129.534.169		1.402.597.145		1.408.857.160		1.410.709.688		1.415.702.372	
Nilai Keputusan Pencatatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pada SPSE	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	129.534.169	1	1.402.597.145	1	1.408.857.160	1	1.410.709.688	1	1.415.702.372	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	1		1		1		1				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1				
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				44.160.000		220.562.500		223.066.509		223.529.641		224.777.812	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	44.160.000	1	220.562.500	1	223.066.509	1	223.529.641	1	224.777.812	
5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				13.123.800		27.810.100		29.062.102		29.525.234		30.773.405	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	13.123.800	1	27.810.100	1	29.062.102	1	29.525.234	1	30.773.405	
5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.250.369		602.662.045		603.914.047		604.377.179		605.625.350	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	47.250.369	1	602.662.045	1	603.914.047	1	604.377.179	1	605.625.350	
5.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		551.562.500		552.814.502		553.277.634		554.525.805	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	1	25.000.000	1	551.562.500	1	552.814.502	1	553.277.634	1	554.525.805	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.549.680.424		4.213.626.254,77		4.219.886.269,77		4.221.738.797,77		4.226.731.481,77	
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	49	2.064.141.024	49	2.814.824.754,77	49	2.816.076.756,77	49	2.816.539.888,77	49	2.817.788.059,77	
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.064.141.024		2.814.824.754,77		2.816.076.756,77		2.816.539.888,77		2.817.788.059,77	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	49	2.064.141.024	49	2.814.824.754,77	49	2.816.076.756,77	49	2.816.539.888,77	49	2.817.788.059,77	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorial pada BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	2	1.267.820.400	2	1.091.882.900	2	1.093.134.902	2	1.093.598.034	2	1.094.846.205	
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.267.820.400		1.091.882.900		1.093.134.902		1.093.598.034		1.094.846.205	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	2	1.267.820.400	2	1.091.882.900	2	1.093.134.902	2	1.093.598.034	2	1.094.846.205	
Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	90	8.919.000	90	61.562.500	90	64.066.509	90	64.529.641	90	65.777.812	
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.919.000		61.562.500		64.066.509		64.529.641		65.777.812	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	90	8.919.000	90	61.562.500	90	64.066.509	90	64.529.641	90	65.777.812	
Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	208.800.000	1	245.356.100	1	246.608.102	1	247.071.234	1	248.319.405	
5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				208.800.000		245.356.100		246.608.102		247.071.234		248.319.405	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	208.800.000	1	245.356.100	1	246.608.102	1	247.071.234	1	248.319.405	
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				985.545.900		2.004.010.822,23		2.009.018.835,23		2.010.871.362,23		2.015.864.046,23	
Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	13	985.545.900	13	2.004.010.822,23	13	2.009.018.835,23	13	2.010.871.362,23	13	2.015.864.046,23	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3		3		3		3				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3		3		3		3				
5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				741.530.900		904.953.333		907.457.342		908.074.851		909.739.079	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	13	741.530.900	13	904.953.333	13	907.457.342	13	908.074.851	13	909.739.079	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000		468.933.369,91		470.185.371,91		470.802.880,91		472.467.108,91	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	65.000.000	3	468.933.369,91	3	470.185.371,91	3	470.802.880,91	3	472.467.108,91	
5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				179.015.000		630.124.119,32		631.376.121,32		631.993.630,32		633.657.858,32	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	179.015.000	3	630.124.119,32	3	631.376.121,32	3	631.993.630,32	3	633.657.858,32	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				715.443.669.716		828.674.811.062,06		896.585.912.304,26		970.291.212.191,93		1.010.832.585.866,84	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Nilai IPKD Dimensi Opini BPK Atas LKPD (Nilai)	15	10	1.550.000.000	10	4.573.030.048	10	4.580.096.143	10	4.594.916.382	10	4.614.857.873	
5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.550.000.000		4.573.030.048		4.580.096.143		4.594.916.382		4.614.857.873	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang di Susun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures), Patuh Terhadap Peraturan Perundang - Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2	1.550.000.000	2	4.573.030.048	2	4.580.096.143	2	4.594.916.382	2	4.614.857.873	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	225	225		225		225		225		225		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	0	100		100		100		100		100		
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	82		82		82		82		82		
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	390	400		400		400		400		400		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	0	100		100		100		100		100			
5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				300.000.000		960.925.754		963.494.712		964.916.382		969.832.740		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	390	400	300.000.000	400	960.925.754	400	963.494.712	400	964.916.382	400	969.832.740		
5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				400.000.000		1.272.430.777		1.268.865.238		1.279.000.000		1.280.823.080		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	82	400.000.000	82	1.272.430.777	82	1.268.865.238	82	1.279.000.000	82	1.280.823.080		
5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				250.000.000		814.043.995		815.584.784		817.000.000		821.338.973		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	225	225	250.000.000	225	814.043.995	225	815.584.784	225	817.000.000	225	821.338.973	
5.02.02.1.04.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				300.000.000		880.661.174		882.668.284		884.000.000		887.663.080	
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	880.661.174	2	882.668.284	2	884.000.000	2	887.663.080	
5.02.02.1.04.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				150.000.000		284.796.674		286.790.250		287.000.000		289.296.000	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	0	100	150.000.000	100	284.796.674	100	286.790.250	100	287.000.000	100	289.296.000	
5.02.02.1.04.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi				150.000.000		360.171.674		362.692.875		363.000.000		365.904.000	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	0	100	150.000.000	100	360.171.674	100	362.692.875	100	363.000.000	100	365.904.000	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (Nilai)	19,643	19,951	1.550.000.000	20	5.073.030.048	20	5.080.096.143	20	5.094.916.382	20	5.114.857.873	
	Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Nilai)	8,928	9,231		9,38		9,55		9,78		10,18		
5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.413.360.350		4.332.473.061		4.336.979.973		4.348.000.000		4.362.966.160	
Jumlah Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	80	53	796.370.575	53	1.541.630.861	53	1.543.979.973	53	1.549.000.000	53	1.556.765.814	
	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	80	53		53		53		53		53		
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	3	4		4		4		4		4		
5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				370.697.250		511.862.956		512.000.000		513.000.000		514.790.907	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	3	4	370.697.250	4	511.862.956	4	512.000.000	4	513.000.000	4	514.790.907	
5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				202.566.625		251.947.190		252.479.973		253.000.000		255.024.000	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	202.566.625	2	251.947.190	2	252.479.973	2	253.000.000	2	255.024.000	
5.02.02.1.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD				171.371.125		470.283.741		471.500.000		473.000.000		474.470.907	
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	80	53	171.371.125	53	470.283.741	53	471.500.000	53	473.000.000	53	474.470.907	
5.02.02.1.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD				51.735.575		307.536.974		308.000.000		310.000.000		312.480.000	
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	80	53	51.735.575	53	307.536.974	53	308.000.000	53	310.000.000	53	312.480.000	
Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	96	266	616.989.775	266	2.790.842.200	266	2.793.000.000	266	2.799.000.000	266	2.806.200.346	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				125.940.350		1.681.510.646		1.682.000.000		1.685.000.000		1.687.914.532	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	125.940.350	2	1.681.510.646	2	1.682.000.000	2	1.685.000.000	2	1.687.914.532	
5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				124.142.875		341.258.801		342.000.000		343.000.000		345.744.000	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	124.142.875	2	341.258.801	2	342.000.000	2	343.000.000	2	345.744.000	
5.02.02.1.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				366.906.550		768.072.753		769.000.000		771.000.000		772.541.814	
Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	96	266	366.906.550	266	768.072.753	266	769.000.000	266	771.000.000	266	772.541.814	
5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				136.639.650		740.556.987		743.116.170		746.916.382		751.891.713	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tersusun, Persentase Kabupaten/Kota yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	13	13	136.639.650	13	740.556.987	13	743.116.170	13	746.916.382	13	751.891.713	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	13	13		13		13		13		13		
5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				68.278.900		516.246.888		517.235.901		519.000.000		522.152.000	
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	13	13	68.278.900	13	516.246.888	13	517.235.901	13	519.000.000	13	522.152.000	
5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				68.360.750		224.310.099		225.880.269		227.916.382		229.739.713	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	13	13	68.360.750	13	224.310.099	13	225.880.269	13	227.916.382	13	229.739.713	
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Nilai IPKD Dimensi Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah (Nilai)	15	15,15	712.343.669.716	15,3	819.028.750.966,06	15,5	886.925.720.018,26	15,8	960.601.379.427,93	16,15	1.001.102.870.120,84	
	Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Nilai)	4,281	4,59		4,74		4,95		5,44		5,68		
5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.550.000.000		4.573.030.048		4.580.096.143		4.594.916.382		4.614.857.873	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	100	880.044.555	100	2.395.337.176	100	2.399.521.338	100	2.403.083.618	100	2.413.899.364	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	20	20		20		20		20		20		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.02.02.1.03.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				73.455.756		501.096.338		502.439.889		503.000.000		504.921.770		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4	4	73.455.756	4	501.096.338	4	502.439.889	4	503.000.000	4	504.921.770		
5.02.02.1.03.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				95.293.515		605.189.133		607.394.815		608.000.000		610.761.770		
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5	16	95.293.515	16	605.189.133	16	607.394.815	16	608.000.000	16	610.761.770		
5.02.02.1.03.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				26.063.982		484.154.646		484.441.396		486.000.000		489.887.998		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	20	20	26.063.982	20	484.154.646	20	484.441.396	20	486.000.000	20	489.887.998	
5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				685.231.302		804.897.059		805.245.238		806.083.618		808.327.826	
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	100	685.231.302	100	804.897.059	100	805.245.238	100	806.083.618	100	808.327.826	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	16	4	122.974.000	4	506.933.690	4	507.064.995	4	508.000.000	4	509.961.770	
5.02.02.1.03.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				122.974.000		506.933.690		507.064.995		508.000.000		509.961.770	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	16	4	122.974.000	4	506.933.690	4	507.064.995	4	508.000.000	4	509.961.770	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	17	17	546.981.445	17	1.670.759.182	17	1.673.509.810	17	1.683.832.764	17	1.690.996.739	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	14	14		14		14		14		14		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	24	24		24		24		24		24			
5.02.02.1.03.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				86.538.945		497.072.281		498.832.898		502.832.764		504.753.199		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	24	24	86.538.945	24	497.072.281	24	498.832.898	24	502.832.764	24	504.753.199		
5.02.02.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				11.829.500		578.809.028		579.371.585		581.000.000		583.545.770		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	14	14	11.829.500	14	578.809.028	14	579.371.585	14	581.000.000	14	583.545.770		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				448.613.000		594.877.873		595.305.327		600.000.000		602.697.770	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	17	17	448.613.000	17	594.877.873	17	595.305.327	17	600.000.000	17	602.697.770	
5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				710.793.669.716		814.455.720.918,06		882.345.623.875,26		956.006.463.045,93		996.488.012.247,84	
Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Belanja Langsung Yang Tersusun, Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	0	4	710.793.669.716	4	814.455.720.918,06	4	882.345.623.875,26	4	956.006.463.045,93	4	996.488.012.247,84	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	0	1		1		1		1				
5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				73.412.840.000		73.412.840.000		73.412.840.000		73.412.840.000		73.412.840.000	
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	0	1	73.412.840.000	1	73.412.840.000	1	73.412.840.000	1	73.412.840.000	1	73.412.840.000	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				10.000.000.000		12.780.000.000		14.500.000.000		16.850.000.000		18.950.000.000	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	0	1	10.000.000.000	1	12.780.000.000	1	14.500.000.000	1	16.850.000.000	1	18.950.000.000	
5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				627.380.829.716		728.262.880.918,06		794.432.783.875,26		865.743.623.045,93		904.125.172.247,84	
Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	0	4	627.380.829.716	4	728.262.880.918,06	4	794.432.783.875,26	4	865.743.623.045,93	4	904.125.172.247,84	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				6.050.000.000		4.575.480.416		4.590.254.216		4.601.561.824		4.669.857.873	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	9,76	9,8	6.050.000.000	9,9	4.575.480.416	10	4.590.254.216	10,1	4.601.561.824	10,2	4.669.857.873	
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) (Indeks)	2,13	2,97		3,05		3,13		3,28		3,34		
5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				6.050.000.000		4.575.480.416		4.590.254.216		4.601.561.824		4.669.857.873	
Jumlah Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	2	205.233.100	2	633.090.910	2	636.353.637	2	638.956.183	2	650.364.542	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )	3	5		5		5		5		5		
5.02.03.1.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				173.049.450		414.578.233		416.797.793		417.956.183		424.448.187	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	2	173.049.450	2	414.578.233	2	416.797.793	2	417.956.183	2	424.448.187	
5.02.03.1.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				32.183.650		218.512.677		219.555.844		221.000.000		225.916.355	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )	3	5	32.183.650	5	218.512.677	5	219.555.844	5	221.000.000	5	225.916.355	
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	926.450.300	1	2.984.902.617	1	2.993.980.578	1	3.000.700.000	1	3.043.595.735	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	4	181		181		181		181		181		
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	242		242		242		242		242		
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )	2	2		2		2		2		2		
5.02.03.1.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				10.505.200		386.925.375		388.665.646		390.000.000		396.268.355	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )	2	2	10.505.200	2	386.925.375	2	388.665.646	2	390.000.000	2	396.268.355	
5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				11.477.550		457.332.786		458.808.873		460.000.000		466.828.355	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )	2	2	11.477.550	2	457.332.786	2	458.808.873	2	460.000.000	2	466.828.355	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.03.1.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				774.400.100		1.266.704.246		1.270.036.562		1.271.500.000		1.284.729.360	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	2	774.400.100	2	1.266.704.246	2	1.270.036.562	2	1.271.500.000	2	1.284.729.360	
5.02.03.1.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				37.646.450		389.839.500		391.000.000		392.200.000		398.485.955	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	37.646.450	1	389.839.500	1	391.000.000	1	392.200.000	1	398.485.955	
5.02.03.1.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				10.954.150		277.606.627		278.004.359		279.000.000		284.471.355	
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	242	10.954.150	242	277.606.627	242	278.004.359	242	279.000.000	242	284.471.355	
5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				81.466.850		206.494.083		207.465.138		208.000.000		212.812.355	
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	4	181	81.466.850	181	206.494.083	181	207.465.138	181	208.000.000	181	212.812.355	
Jumlah Laporan Pengawasan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	42	4.918.316.600	42	957.486.889	42	959.920.001	42	961.905.641	42	975.897.596	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	2		2		2						

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.02.03.1.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				4.876.665.150		719.725.547		721.000.000		721.905.641		730.829.241	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	2	4.876.665.150	2	719.725.547	2	721.000.000	2	721.905.641	2	730.829.241	
5.02.03.1.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				41.651.450		237.761.342		238.920.001		240.000.000		245.068.355	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	42	41.651.450	42	237.761.342	42	238.920.001	42	240.000.000	42	245.068.355	

Tabel 4.4

**DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM  
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>				
1.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN SUBKEGIATAN /	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.1.04.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
2.	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITYAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN SUBKEGIATAN /</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			5.02.03.1.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

Indikator Kinerja Utama merupakan Keberhasilan Instansi atau lembaga Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberikan gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. Untuk tahun mendatang periode pembangunan 2025-2029, target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pondasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

Tabel 4.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah									
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	77,593	78,32	78,92	79,42	80	81,02	82,01	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan strategis yang lebih spesifik. IKK berfungsi sebagai Indikator Utama yang mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan. Keselarasan IKU dan IKK memungkinkan terwujudnya system pengukuran kinerja yang komperhensif, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hubungan antara IKU dan IKK menjadi pedoman utama dalam Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kinerja BPKAD secara menyeluruh. Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029

Tabel 4.6

INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD)	komulatif	Indeks	2,13	2,13	2,97	3,05	3,13	3,28	3,34	
3.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	komulatif	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

## BAB V PENUTUP

Renstra Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sangat tergantung pada pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan yang berada dilingkup BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditetapkan dengan memperhitungkan seluruh sumberdaya.

Penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 merupakan bagian dari komitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu lima (5) tahun secara konsisten dan terukur, dengan memperhatikan dokumen RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Penyusunan Program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai pijakan utama dalam mewujudkan Visi-Misi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029.

- **Kaidah Pelaksanaan**

Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 merupakan acuan dan rujukan utama dalam untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- **Kaidah Pembiayaan**

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Strategi dan Kebijakan 5 (lima) Tahun ke depan pada prinsipnya untuk mewujudkan

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesenambungan antara program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah; Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai BPKAD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029 ; dan
  2. Konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD untuk mendukung suksesnya Program RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029.
- **Rencana Tindak Lanjut**
    1. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan diklat dan bimtek
    2. Melakukan Bimtek terkait Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
    3. Perbaikan sarana dan prasarana perkantoran guna menunjang kinerja pegawai
    4. Membangun sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik yang terintegrasi
    5. Melakukan konsultasi terkait tata cara dan mekanisme penyelesaian hutang piutang daerah/ negara dan akun keuangan lainnya kepada instansi yg terkait
    6. Mengoptimalkan rapat Tim Penyelesaian kerugian daerah
    7. Melaksanakan sidang majelis bersama Tim Penyelesaian Kerugian Daerah setiap triwulan
    8. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melakukan tindak lanjut secara langsung kepada yang bersangkutan terkait tanggungjawab yang harus diselesaikan terkait kerugian daerah
    9. SDM pengelola keuangan di perangkat daerah tidak dipindah/ mutasi
    10. Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan perangkat daerah
    11. Penggunaan paralel jalan aplikasi SIPD dan SIMDA
    12. Melakukan rapat koordinasi/ rekonsiliasi pengelolaan BMD
    13. Mengalokasikan anggaran sertifikasi aset pada masing-masing perangkat daerah selaku pengguna BMD
    14. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Kejaksaan Tinggi serta BPN Provinsi Sulawesi Tengah terkait solusi persoalan dokumen asal usul tanah yang tercatat dalam Simda BMD

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029**

Demikian penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 ini, untuk menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta akan menjadi acuan untuk mengukur/ menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.